

IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN KAUM DIFABEL PADA SEKOLAH LUAR BIASA-A BARTEMEUS DI KOTA MANADO

Michael Giovanni Mawikere¹

Frans Singkoh²

Alfon Kimbal³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pelayanan Pendidikan Kaum Difabel pada Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara dengan 3 orang sebagai informan. Penelitian ini menunjukkan implementasi program Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Sulawesi dalam pelayanan pendidikan kaum difabel pada Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado. Dari hasil penelitian, penulis temukan bahwa (1), di Sekolah Luar-Biasa A Bartemeus, belum tersedia ruang keterampilan untuk proses belajar mengajar dan latihan keterampilan bagi siswa difabel, (2) walaupun fasilitas ruangan proses belajar mengajar dan latihan belum tersedia secara lengkap bagi siswa difabel, namun demikian, proses belajar mengajar dan keterampilan ini tetap dilaksanakan sesuai keadaan tempat/kondisi ruangan yang tersedia, (3) kondisi ruangan yang kurang lengkap ini menurut hasil penelitian peneliti sudah sekitar 15 tahun belum tersedia secara lengkap, (4) pihak sekolah Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus Kota Manado telah membuat program dan mengusulkan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, tapi sampai saat ini belum dapat direalisasikan.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Pelayanan, Pendidikan, Kaum Difabel.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus mendapat bantuan dari berbagai sumber. Untuk majalah buku braille Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus mendapat kiriman dari Balai Penerbitan Braille Indonesia "Abiyoso" di Bandung. Untuk buku pelajaran awas dan dana mencetak dari Direktorat Pendidikan Khusus Layanan Khusus yang bertempat di Jakarta. Yang mengalih aksarakan (menerjemahkan) buku pelajaran dari Direktorat Pendidikan Khusus Layanan Khusus dari buku awas menjadi buku braille adalah Sekolah Luar Biasa-A Pembina Tingkat Nasional. Letaknya di Jl. Pertanian Raya 12 RT 006 RW 04 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan DKI Jakarta, RT. 10/RW.4, Lb. Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440. Terjemahannya dikirim dalam bentuk disk ke Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus dan dicetak di sana, karena Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus memiliki percetakan sendiri.

Peneliti mendapati bahwa Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus memiliki beberapa masalah, yaitu:

1. Tidak tersedianya Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) untuk Anak Berkebutuhan Khusus tunanetra. Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) merupakan tempat latihan gerak, pembentukan postur tubuh, gaya jalan dan olahraga. Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) dilengkapi dengan berbagai sarana. Misalnya: Lemari dan berbagai peralatan Orientasi dan Mobilitas (OM) seperti tongkat panjang untuk ukuran dewasa/anak-anak, tongkat lipat, blindfold, kompas bicara, stopwatch, denah ruang timbul, alat keseimbangan badan, matras, tape recorder, alat musik pukul, alat musik

tiup, alat musik petik, alat musik gesek, kotak kontak, dsb.

2. Pengadaan Ruang Keterampilan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran keterampilan sesuai dengan program keterampilan yang dipilih oleh sekolah. Misalnya, untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) keterampilan yang dipilih: Keterampilan rekayasa, keterampilan jasa atau keterampilan perkantoran dan keterampilan ini dilengkapi dengan sarana sesuai jenis keterampilan

3. Pemisahan Gedung Sekolah dengan Panti Asuhan (Satu Atap).

4. Terbatasnya Lahan Sekolah.

Belum adanya tenaga administrasi sekolah, sehingga pekerjaan administrasi dilaksanakan oleh guru yang ditunjuk bersama kepala sekolah. Ini dikarenakan terbatasnya dana sekolah untuk membayar tenaga administrasi dan Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus menerapkan sekolah gratis untuk peserta didik yang mengikuti pendidikan. Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus menunggu tenaga administrasi yang disiapkan pemerintah dan sudah bermohon ke dinas pendidikan.

Belum ada mobil jemputan untuk peserta didik yang tinggal jauh dari sekolah. Pengurusnya diharapkan mempunyai latar belakang pendidikan yang seyogyanya mungkin mengenal cara melayani Anak Berkebutuhan Khusus (Kalau memungkinkan tenaga Pekerja Sosial atau yang pernah mengikuti Diklat tentang pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus).

Pembayaran honor untuk 5 tenaga pendidik belum maksimal oleh karena keterbatasan dana sekolah selain sekolah mendapat bantuan pemerintah

(Dinas Pendidikan Daerah/Bantuan Operasional Ssekolah).

Tinjauan Pustaka

Konsep Implementasi

Presman dan Wildavsky (dalam Wahab (2012:60)) (dalam Wahyu Nurhajadmo, 2010) mengartikan implementasi sebagai “to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”, (atau “membawa, menyelesaikan, memenuhi, menghasilkan, melengkap”). Pressman dan Wildavsky dalam J.R.G. Djopari (2016:512) juga menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat/kelompok-kelompok pemerintah atau swasta demi tercapainya tujuan yang digariskan dalam kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012:65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam J.R.G. Djopari (2016:512), implementasi adalah kejadian-kejadian yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan pemerintah, baik usaha administrasi atau untuk menimbulkan dampak pada masyarakat/kejadian, sementara menurut Dr. Riant Nugroho (2014:657), “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.”

Menurut Edi Suharto (2013:36), tahap implementasi melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai

pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Udoji (dalam Abdul Wahab, 2012:45). Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome). Menurut Anderson (1979:68), ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan, yaitu: 1) siapa yang mengimplementasikan, 2) hakekat dari proses administrasi, 3) kepatuhan, dan 4) dampak dari pelaksanaan kebijakan (Wahyu Nurhajadmo, 2008).

Menurut Abdullah dan Smith dalam Tachjan (2008:26-36) mengemukakan: Implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah : “(1) unsur pelaksana (implementor). (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) target groups”

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik (Sharkansky, 1975; Ripley & Grace A. Franklin, 1986) pada setiap tingkat pemerintahan. Smith dalam Quade (1977 : 261) menyebutnya dengan istilah “implementing organization”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Hal ini seperti dikemukakan pula oleh Ripley & Grace A. Franklin (1986 : 33) bahwa: “Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and

policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant". Maksudnya unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan.

Jadi unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan ia memiliki diskresi mengenai instrument apa yang paling tepat untuk digunakan.

Menurut Dimock & Dimock dalam Tachjan (2008:117), ilmu administrasi terdiri dari pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kebijakan publik (politik), dalam phase pertama yang harus dilakukan oleh administrator dalam setiap unit administratif adalah menetapkan tujuan dan sasaran dari rencananya, kemudian berdasarkan hasil analisis perumusan kebijakan ditentukan kebijakan administratif yang bersifat ke dalam sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan berpijak kepada kebijakan yang telah ditentukan dilakukan penyusunan rencana (planning). Rencana-rencana yang dirumuskan ini merupakan hasil mengenai penjabaran kebijakan serta berbagai keputusan yang telah diambil. Penetapan tujuan, sasaran, dan

penyusunan rencana tersebut sesuai dengan urusan (tugas) yang menjadi tanggung jawab setiap unit administratif. Selanjutnya, rencana-rencana yang telah disusun dijabarkan lagi ke dalam program-program operasional. Penyusunan program ini harus bersifat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus jelas dalam penyusunan program adalah penggambaran tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik uraian kegiatan bagi setiap satuan kerja maupun uraian kegiatan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Jadi sebagai output dari kegiatan phase pertama dari unit administratif, jika ia dipandang sebagai suatu sistem adalah berupa kebijakan-kebijakan administratif, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis operasional yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam program-program operasional, sehingga terbentuk struktur program (Lemay, 2002:33).

Selanjutnya dalam phase kedua yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah pengorganisasian. Dengan melalui tindakan ini akan terbentuk suatu organisasi (bisa dalam bentuk tim) yang siap untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Oleh karena dengan melalui pengorganisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja ditata sedemikian rupa sehingga dapat digerakan untuk melaksanakan kegiatan. Dan sejalan dengan tindakan ini, orang-orang tersebut perlu dimotivasi (motivating) agar mereka mempunyai sikap dan

komitmen terhadap pelaksanaan program.

Secara etimologi, kata “program” diambil langsung dari kata Bahasa Inggris, yaitu “program” juga, yang diambil dari kata bahasa Yunani, yaitu “programma” yang artinya “a written public notice”, atau “pemberitahuan umum yang tertulis”. “Programma” bersumber dari kata “prographein” yang berarti “to write publicly” atau “untuk menulis secara umum”. “Prographein” berasal dari dua kata Yunani, yaitu “pro” dan “graphein”, yaitu “sebelum” dan “menulis”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program merupakan “rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan”.

Secara terminologi, program adalah suatu rangkaian kegiatan sebagai bentuk implementasi dari suatu kebijakan. Menurut pengertian secara umum, program diartikan sebagai “rencana” yang akan dilakukan/dikerjakan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan (Suharsimi dan Cepi Safruddin, 2009).

Program diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan di mana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai (Jones, 2017).

Jadi dapat disimpulkan bahwa program adalah rencana tertulis resmi yang berupa rancangan rangkaian

kegiatan, sebagai bentuk implementasi dari suatu kebijakan, yang dilaksanakan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan.

2.3 Konsep Pelayanan

Secara etimologi, kata “pelayanan” berasal dari kata “layan”, yang artinya adalah berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa saja yang diperlukan seseorang. Sementara arti pelayanan, menurut Hardiyansyah (2011:14), adalah “aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain.”

Moenir (2005:47) menjelaskan bahwa “Pelayanan ialah sebuah proses dari pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.” Fred Luthans (1995:46) menjelaskan bahwa “Pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang menyangkut segala masalah yang ditujukan orang lain untuk menyelesaikan masalah.”

Pelayanan adalah salah satu bagian dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dalam proses pelayanan, ada dua pihak: Pelayan atau yang melayani, dan pelanggan atau yang dilayani. Mengapa proses pelayanan terjadi? Karena tidak seorang pun dapat memenuhi segala kebutuhan mereka sendiri. Kita dapat melihat bukti-bukti dari kenyataan ini di tengah masyarakat. Salah satu contohnya adalah pelayanan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pendidik adalah pihak yang memberikan pelayanan pendidikan dan peserta didik adalah pihak yang menerima pelayanan pendidikan. Peserta didik tidak dapat

memenuhi kebutuhan atas pendidikan mereka sendiri dan membutuhkan bantuan pendidik yang sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memiliki keterampilan untuk mendidik.

Menurut Lovelock (dalam Hardiyansyah, 2011), "service" (pelayanan) adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami." Pelayanan macam ini memiliki istilah lain di Indonesia: Jasa. Jasa adalah pelayanan tak berwujud. Contohnya adalah pelayanan pendidikan. Pendidikan tidak berwujud. Tidak dapat dilihat dan diraba.

Jasa berlangsung sementara saja. Hanya berlangsung saat pelayan atau pemberi jasa melayani pelanggan. Contohnya adalah jasa pijat. Jasa pijat hanya berlangsung ketika tukang pijat memijati tubuh pelanggan. Begitu pula dengan pelayanan atau jasa pendidikan. Hanya berlangsung ketika pendidik mengajar kepada peserta didik di kelas.

Tetapi walaupun hanya berlangsung sebentar saja, efek dari pelayanan bertahan melampaui pelayanan itu sendiri. Rasa enak yang dirasakan pelanggan setelah dipijat bertahan melampaui proses pemijatan itu sendiri. Begitupun juga dengan pelayanan pendidikan. Walaupun proses pendidikan hanya berlangsung selama pendidik mendidik para peserta didik di kelas, tetapi pengetahuan yang diberikan tertanam di otak peserta didik melampaui proses pendidikan itu sendiri. Tetapi sangat penting bagi peserta didik untuk me-review semua yang diajarkan pendidik di kelas. Bukan hanya untuk ujian, tetapi juga untuk perkembangan peserta didik sendiri. Alasannya adalah karena manusia bisa

lupa, dan beberapa orang cenderung lebih sering lupa daripada orang lain (pelupa).

Pelayanan atau jasa, walaupun tidak berwujud dan tidak dapat dilihat dan diraba, tetapi dapat dialami dan dirasakan manfaatnya. Begitu pula dengan pelayanan pendidikan. Kita tidak dapat merasakan pendidikan dalam konteks indera peraba, karena pendidikan bukan materi, tetapi pendidikan dapat kita alami dan rasakan manfaatnya. Kita mengalami pendidikan dengan belajar, baik itu belajar sendiri maupun dibawah seorang pendidik, dan kita merasakan berbagai manfaat dari pelayanan pendidikan, seperti bertambahnya pengetahuan, meluasnya wawasan, mendapatkan keterampilan-keterampilan baru.

Pada akhirnya, semua jenis pelayanan memiliki satu tujuan: Imbalan. Pemberi pelayanan atau pelayan memberikan layanan kepada pelanggan dengan ekspektasi pelanggan memberikan pelayan imbalan sebesar yang telah ditentukan. Imbalan umumnya berupa uang, tunai maupun kredit.

Jadi kesimpulannya adalah: Pelayanan adalah proses pemberian layanan oleh pelayan kepada pelanggan, dengan ekspektasi bahwa pelanggan akan memberikan imbalan kepada pelayan atas balas jasa pelayan kepada pelanggan, dan pelayanan dilakukan karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi semua kebutuhannya dan menyelesaikan semua masalahnya sendiri.

Noor Syam (Danim, 2011:4) mendefinisikan pendidikan sebagai aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi

pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa cipta, dan budi nurani) dan jasmani (pancaindra serta keterampilan-keterampilan).

Pendidikan adalah suatu aktivitas, dan aktivitas memerlukan usaha. Usaha dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang memerlukan waktu dan tenaga untuk mendapatkan dan/atau menghasilkan sesuatu.

Dalam pendidikan, usaha dilakukan untuk meningkatkan kepribadian. Yang dimaksud dengan meningkatkan kepribadian adalah membentuk kepribadian yang baik, dan kepribadian yang baik dianggap “baik” karena menguntungkan orang lain. Peningkatan kepribadian dilakukan dengan membina potensi-potensi pribadi, atau potensi-potensi yang ada dalam diri kita masing-masing.

Potensi-potensi pribadi tersebut adalah:

a. Ruhani, atau rohani, yaitu segala sesuatu di dalam diri manusia yang tidak bersifat materi, yaitu hati dan pikiran manusia.

- Pikir adalah akal budi (reason) manusia, atau kemampuan kognitif (otak) manusia. Contohnya adalah kemampuan bernalar, menganalisa, menghitung, merencanakan, dan membuat keputusan;
- Karsa adalah niat atau kemauan. Dalam konteks pendidikan, niat yang ingin diajarkan adalah niat-niat yang baik;
- Rasa cipta adalah kemampuan untuk berpikir kreatif. Peserta didik dididik untuk tidak hanya menerima saja, tetapi juga membuat atau berkarya;
- Budi nurani berarti perasaan hati. Yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk berempati. Untuk memahami perasaan orang lain dan

tidak hanya mementingkan perasaan sendiri.

b. Jasmani, yaitu tubuh atau fisik manusia. Yang dimaksud dengan pancaindra adalah lima indera manusia: Indera peraba, pengecap, pencium, pendengar, dan pelihat. Yang dimaksud dengan keterampilan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas dengan hasil yang telah ditentukan.

Ahmad D. Marimba (1989) menjelaskan pendidikan sebagai bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Tentang perkembangan jasmani dan rohani telah dijelaskan di atas, sementara kepribadian utama yang dimaksudkan adalah kepribadian yang ingin dibentuk pendidik dalam diri peserta didik, dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kepribadian utama tentulah kepribadian yang baik.

Redja Muihardjo (2012:6) memberikan definisi pendidikan secara sempit bahwa pendidikan adalah sekolah. Sekolah, sebagai suatu lembaga pendidikan formal, adalah tempat dimana pendidikan pada umumnya dilaksanakan. Secara luas, Redja Muihardjo (2012:3) memberikan definisi pendidikan sebagai segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang memengaruhi pertumbuhan individu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang lebih melihat segi alamiah daripada statistik. Atas dasar

pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong, 2010:3).

Penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah dengan narasi-narasi yang tidak menggunakan perhitungan atau jumlah-jumlah dari perhitungan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4), metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sedangkan menurut Sugiyono (2016:8), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).

Informan dari penelitian ini terdiri dari seluruh komponen atau bagian yang terdapat dalam Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado, yaitu:

- 1) Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Kepala Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus;
- 3) Dua guru tetap;
- 4) Satu guru honor;
- 5) Orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.

Hasil Penelitian

Dilihat dari aspek target penyediaan ruangan yang terbatas, pihak sekolah harus berusaha meyakinkan instansi yang berwenang agar memberikan dana sesuai permintaan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat atau kaum difabel yang mengikuti pendidikan di Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus Manado. Dari

kekurangan yang ditemui diharapkan pihak Sekolah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memperhatikannya karena anak-anak didik yang mengikuti pendidikan luar sekolah adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan secara fisik

Dalam hal penyediaan ruangan ternyata orang-orang yang memiliki tubuh yang lengkap lebih diperhatikan. Padahal sesuai aturan setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sedangkan kenyataan di lapangan sebagaimana hasil penelitian di Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado, belum secara serius memperhatikan fasilitas-fasilitas yang seharusnya harus tersedia secara baik bagi siswa difabel.

Dari aspek pelaksanaan, program dan target group belum terlaksana secara optimal walaupun pihak sekolah yaitu Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus Manado sudah berupaya untuk tersedianya ruang yang memadai, guna kepentingan anak didik kaum difabel. Upaya ini dibuat dalam bentuk program yang di usulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, namun sampai saat ini belum terlaksana karena terbatasnya dana. Padahal anak didik kaum difabel sesungguhnya harus diperhatikan secara serius berhubungan keadaan dari aspek fisik sangat terbatas.

Pendidikan bagi anak-anak diluar kaum difabel sepertinya diperhatikan secara serius, sedangkan kaum difabel belum mendapatkan perhatian yang lebih. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas dikemukakan bahwa setiap orang memiliki pendidikan layak dan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dalam

kenyataan empirik belum dapat memberikan pelayanan yang sama seperti amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memperhatikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara harus memperhatikan secara serius keluhan pihak Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus Manado agar anak-anak kaum difabel dapat mengenyam/memperoleh pendidikan dan keterampilan yang layak sehingga mereka tidak merasa terlalu ada perbedaan antara anak yang difabel maupun yang tidak difabel.

Kesimpulan

1. Pada dasarnya, di Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus, belum tersedia fasilitas berupa ruangan keterampilan untuk proses belajar mengajar dan latihan keterampilan bagi siswa yang ada atau mengikuti pendidikan Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado. Dilihat dari aspek siswa yang memiliki keterbatasan dalam hal ini difabel, seharusnya hal ini harus tersedia.
2. Walaupun fasilitas ruangan proses belajar mengajar dan latihan belum tersedia secara lengkap bagi siswa difabel, namun demikian, proses belajar mengajar dan keterampilan ini tetap dilaksanakan sesuai keadaan tempat/kondisi ruangan yang tersedia.
3. Kondisi ruangan yang kurang lengkap ini menurut hasil penelitian peneliti sudah sekitar 15 tahun belum tersedia secara lengkap.
4. Pihak sekolah Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus Kota Manado telah

membuat program dan mengusulkan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, tapi sampai saat ini belum dapat direalisasikan.

Saran

1. Diharapkan ruangan proses belajar mengajar dan latihan keterampilan perlu disediakan untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan terhadap siswa difabel.
2. Melalui tersedianya ruangan yang representatif tersedia proses belajar mengajar dan latihan keterampilan akan terwujud sebagaimana apa yang diharapkan.
3. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ruangan proses belajar mengajar dan latihan keterampilan ini dapat terwujud demi meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang lemah secara fisik atau bagi kaum difabel.
4. Diharapkan pihak sekolah dan terutama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dapat memperhatikan secara serius terwujudnya ruangan proses belajar mengajar dan latihan keterampilan bagi kaum difabel. Penyediaan ruangan ini atau fasilitas ini seyogyanya dapat diperhatikan secara serius bagi kaum difabel. Sedangkan siswa yang memiliki kondisi tubuh yang sempurna dapat diperhatikan, apalagi kaum difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Ahmadi, R. 2016. Pengantar Pendidikan: Asas & Filsafat Pendidikan. Depok: Ar-Ruzz Media.
- Apriyanto, N. 2012. Seluk-Beluk Tunagrahita & Strategi

- Pembelajarannya. Yogyakarta: Javalitera.
- Bilqis, 2012. Lebih Dekat Dengan Anak Tuna Daksa. Yogyakarta: Familia.
- Djopari, J.R.G., 2016. Kebijakan Pemerintahan. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Hamalik, Oemar. 2009. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hardiyansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya). Yogyakarta: Gava Media.
- Jones, Charles O. 2017. Pengantar Kebijakan Publik Terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: Roja Grafindo Persada.
- Luthans, Fred. 2010. Organizational Behavior. Sixth Edition. McGraw-Hill International Edition. Management Series. New York.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudyahardjo, R. 2010. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, D. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Nafi, D. 2012. Pantang Menyerah Mengasuh Asih Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Familia.
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Rahardja, Djaja & Sujarwanto. 2010. Pengantar Pendidikan Luar Biasa. Surabaya: UNESA.
- Smart, A. 2012. Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Katahati.
- Somantri, S. 2009. Psikologi Anak Luar Biasa. Bandung : Refika Aditama
- Sudarwan, D. Pengantar Kependidikan: Landasan, Teori, dan 234 Metafora Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto & Abdul Jabar. 2009. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Syah, Darwyn. 2012. Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT. Gaung Persada Press.
- Syam, Mohammad Noor (Danim). 2011. Filsafat Pendidikan Islam. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung – Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Widjaya, A. 2012. Memahami Anak Tuna Rungu. Yogyakarta: Familia.
- Sumber Lain :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Mambela, Sambira dan Badiah, Lutfi Isni. 2018. Karakteristik dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus. Jurnal Abadimas Adi Buana. 2 (1) : 33-40. <http://jurnal.unipasby.ac.id>

Nurharjadmo, W. 2008. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan (Evaluation Implementation Dual System Education Program in Senior Technical High School). Jurnal Spirit Publik. 4 (2): 215-228. <https://s3.amazonaws.com>.

